

BAB I

PENDAHULUAN

* 1. Latar Belakang

Bahwa sesuai Pasal 13 Ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 menyatakan bahwa Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat Daerah dan RENJA.

Dalam penyusunannya, Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar tahun 2024 mengacu pada Perubahan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RENJA) Kota Blitar Tahun 2024, Perubahan Renstra Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026, dokumen perencanaan lingkup nasional dan regional, serta tindak lanjut dalam proses penyusunan KUPPASP dan RPAPBD Tahun 2024. Penyusunan Perubahan Rancangan Rencana Kerja tahun 2024 ini juga didasarkan pada hasil evaluasi terhadap program dan kegiatan periode sebelumnya serta mempertimbangkan usulan program dan kegiatan dari masyarakat.

Diharapkan dengan penyusunan Perubahan Rencana Kerja ini akan tersusun rencana pembangunan yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan sesuai dengan amanat Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Kerja juga dimaksudkan sebagai parameter dalam memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar sekaligus sebagai instrumen bagi Pemerintah Daerah untuk mengukur Kinerja Penyelenggaraan Fungsi dan Urusan Wajib Daerah.

* 1. Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur/Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
2. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
4. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan pemerintah Pengganti Undang - undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang - undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik IndonesiaTahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020–2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor … Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 (Berita Daerah Nomor … Tahun 2024);
20. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 7);
21. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Blitar Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kota Blitar Tahun 2021 Nomor 4);
22. Peraturan Walikota Blitar Nomor 25 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
23. Peraturan Walikota Blitar Nomor 65 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 48 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Blitar Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Kota Blitar tahun 2023 Nomor 65);
24. Peraturan Walikota Blitar Nomor … Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Blitar Tahun 2024.
    1. Maksud Dan Tujuan

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RENJA Tahun 2024. Tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.

* 1. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi, Informatika Dan Statistik Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

|  |  |
| --- | --- |
| BAB I | PENDAHULUAN,  1.1. Latar Belakang  Mengemukakan latar belakang Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, proses penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara perubahan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen perubahan RENJA Tahun 2024, Renstra Perangkat Daerah, Renja K/L, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RPAPBD Tahun 2024.  1.2. Landasan Hukum  Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang dijadikan acuan dalam penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.  1.3. Maksud dan Tujuan  Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.  Maksud penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah menyediakan dokumen perubahan perencanaan perangkat daerah tahun 2024 dengan mengacu pada perubahan RENJA Tahun 2024. Tujuan penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 adalah sebagai pedoman penyusunan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Blitar Tahun 2024.  1.4. Sistematika Penulisan  Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024, serta susunan garis besar isi dokumen. |
| BAB II | EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAAN  Bab ini memuat telaah evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai dengan Triwulan II. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target periode akhir Renstra Perangkat Daerah Tahun 2021-2026. Sajikan Tabel Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.; |
| BAB III | RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH  Memuat perubahan tujuan dan sasaran tahun 2024 serta perubahan rencana program, kegiatan, indikator, lokasi, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif tahun 2024 berdasarkan hasil analisis pada tahap sebelumnya. Sajikan Tabel Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024, serta Tabel Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah dan Prakiraan Maju.; |
| BAB IV | PENUTUP, Berisikan uraian penutup, berupa:   1. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; 2. Kaidah-kaidah pelaksanaan; dan 3. Rencana tindak lanjut.   Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tanggal dokumen, nama perangkat daerah dan nama dan tanda tangan kepala perangkat daerah, serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.; |

BAB II

EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Realisasi target kinerja output kegiatan pada Dinas Komunikasi , Informatika dan Statistik Kota Blitar Triwulan II terdapat beberapa capaian, yaitu ada yang tercapai sesuai target terutama untuk kegiatan rutin, dan ada yang masih proses pencapaian target yang direncanakan tercapai sampai pada akhir tahun anggaran 2024.

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA dengan target 84 telah tercapai Di TB II dengan realisasi 87,86

* 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah dengan target 100 % telah tercapai 89,5 % hal ini menunjukan bahwa dokumen dan laporan yang di targetkan hampir tercapai yang sisanya menyesuaikan di dokumen yang sesuai direalisasikan disesuaikan dengan agenda kegiatan dimaksud

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah target 100 % tercapai 90 % sisa realisasinya menunggu laporan keuangan yang terjadwal di TB III dan TB IV
2. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah target 100 % tercapai 91,4% target akan tercapai setelah kegiatan pada bulan Agustus sesuai dengan jadwal yg telah disusun .
3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah target 100 % adanya kegiatan rutin yang tertuang dalam sub kegiatan menyebabkan capain realisasinya hanya 50 % sisany a akan dilaksanakan pada TB III dan TB IV
4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah target 100 % adanya kegiatan rutin yang tertuang dalam sub kegiatan menyebabkan capain realisasinya hanya 50 % sisany a akan dilaksanakan pada TB III dan TB IV.

PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL dengan target 96,71 telah tercapai Di TB II dengan realisasi 53,85 dikarenakan data statistik sektoral Peragkat Daerah masih banyak yang belum terpenuhi. Rencana Aksi Telah dilaksanakan desk pemenuhan data statistik sektoral kepada operator Perangkat Daerah selama 4 hari (tgl 19-22 Agustus 2024). Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota dengan target 100 telah tercapai Di TB II dengan realisasi 25,37 dikarenakan beberapa kegiatan statistik berjalan tanpa mengajukan rekomendasi terlebih dahulu melalui aplikasi romantik, selain itu adanya pergeseran anggaran sehingga kegiatan statistik pada perangkat daerah tidak terlaksana. Rencana aksi selanjutnya OPD yang akan melaksanakan kegiatan statistik sudah diingatkan untuk mengajukan rekomendasi baik secara formal (surat) maupun informal (telpun)

Sedangkan untuk realisasi anggaran kegiatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar sampai dengan triwulan II Tahun Anggaran 2024 yang melaksanakan urusan pemerintahan, 5 program dengan 13 kegiatan, 55 Sub Kegiatan dengan anggaran Belanja Langsung Rp. 14.411.595.046 dengan capaian realisasi keuangan sampai dengan triwulan II Tahun 2024 sebesar Rp. 7.003.218.098,- atau 48.59 %. Pencapaian realisasi anggaran triwulan II relatif rendah dikarenakan :

1. Ada beberapa kegiatan yang dilaksanakan di tribulan III;
2. Karena keterbatasan dana pada RAK, sehingga realisasi anggaran tidak bisa direalisasikan
3. Beberapa kegiatan masih dalam proses pelaksanaan.

Tabel 2.1 Evaluasi Terhadap Hasil Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024

13

| **No** | **Tujuan dan Sasaran** | **Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan** | **Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan** | | **Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2021-2026 (Akhir Periode Renstra)** | | **Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah s/d Renja Perangkat Daerah Tahun 2023** | | **Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan yang dievaluasi (Tahun 2024) yang Dievaluasi** | | **Realisasi Kinerja Pada Triwulan** | | | | **Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang dievaluasi** | | **Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024** | | **Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2024 (%)** | | **Unita Perangkat Daerah Penanggung Jawab** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **K** | **Rp** | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** | **I** | | **II** | | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** | **K** | **Rp** |
| **K** | **Rp** | **K** | **Rp** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **(10 =(8+9))** | | **(11 = (6+10))** | | **(12 = (11/5) x 100%)** | | **13** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **TUJUAN 2 : Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah** |  | **Nilai SAKIP Pernangkat Daerah** |  | **A 88,75** |  | **85,27** |  | **86,25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik** |
|  | SASARAN 5 : Meningkatnya kinerja Perangkat Daerah |  | **Nilai SAKIP Pernangkat Daerah** |  | **A 88,75** |  | **85,27** |  | **86,25** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik** |
|  |  | **PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA** | **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)** | **INDEKS** | **Baik (79-84)** | **23.134.374.247,01** | **85,64** | **4.969.185.948,00** | **84** | **5.238.213.036,00** | **87,86** | **916.608.488,00** | **0** | **1.952.954.229,00** | **87,86** | **2.869.562.717,00** | **87.86** | **2.869.562.717,00** | **104,6** | **54,78** |  |
|  |  | **Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah** | **Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart** | **Persen** | **100** | **188.575.361,00** | **100** | **32.025.031,00** | **100** | **20.139.150,00** | **68** | **2.650.000,00** | **21,5** | **3.710.000,00** | **89,5** | **6.360.000,00** | **89,5** | **6.360.000,00** | **89,5** | **31,58** |  |
|  |  | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Dokumen | 44 | 75.434.580,00 | 13 | 2.490.000,00 | 11 | 5.239.150,00 | 8 | 2.650.000,00 | 1 | 0 | 9 | 2.650.000,00 | 17 | 2.650.000,00 | 81,82 | 50,58 |  |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Laporan | 28 | 113.140.781 | 7 | 24.500.031,00 | 7 | 10.000.000,00 | 5 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 12 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Laporan | 4 | 34.600.000 | 2 | 5.035.000,00 | 1 | 4.900.000,00 | 0 | 0 | 1 | 3.710.000,00 | 1 | 3.710.000,00 | 1 | 3.710.000,00 | 100 | 75,71 |  |
| Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 93,94 | 42,1 |  |
| Predikat kinerja(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah |  |
|  |  | **Administrasi Keuangan Perangkat Daerah** | **Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar** | **Persen** | **100** | **18.723.273.706,00** | **100** | **3.621.820.418,00** | **100** | **3.994.465.046,00** | **0** | **701.863.405,00** | **90** | **1.623.755.696,00** | **90** | **2.325.619.101,00** | **90** | **2.325.619.101,00** | **90** | **58,22** |  |
|  |  | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/bulan | 52 | 18.688.426.799,00 | 13 | 3.614.339.018,00 | 31 | 3.987.165.046,00 | 30 | 701.863.405,00 | 33 | 1.622.695.696,00 | 33 | 2.324.559.101,00 | 33 | 2.324.559.101,00 | 106,45 | 58,3 |  |
|  |  | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | Laporan | 16 | 34.846.909 | 4 | 7.481.400,00 | 4 | 7.300.000,00 | 1 | 0 | 1 | 1.060.000,00 | 2 | 1.060.000,00 | 2 | 1.060.000,00 | 50 | 14,52 |  |
| Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 78,23 | 36,41 |  |
| Predikat kinerja(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Tinggi | Sangat Rendah |  |
|  |  | **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah** | **Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar** | **Persen** | **100** | **5.807.987.420,00** | **100** | **94.241.500,00** | **100** | **116.900.800,00** | **38** | **1.540.000,00** | **53,4** | **54.629.000,00** | **91,4** | **56.169.000,00** | **91,4** | **56.169.000,00** | **91,4** | **48,05** |  |
|  |  | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | Paket | 249 | 114.516.673,00 | 68 | 26.944.000,00 | 65 | 24.790.400,00 | 41 | 0 | 21 | 24.784.000,00 | 62 | 24.784.000,00 | 103 | 24.784.000,00 | 95,38 | 99,97 |  |
|  |  | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Orang | 350 | 5.693.470.846 | 50 | 67.297.500,00 | 100.00 | 92.110.400,00 | 4 | 1.540.000,00 | 48 | 29.845.000,00 | 52 | 31.385.000,00 | 56 | 31.385.000,00 | 52 | 34,07 |  |
| Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 73,69 | 67,02 |  |
| Predikat kinerja(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sedang | Sedang |  |
|  |  | **Administrasi Umum Perangkat Daerah** | **Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar** | **Persen** | **100** | **1.696.820.829,00** | **100** | **404.690.122,00** | **100** | **296.515.100,00** | **0** | **64.689.635,00** | **50** | **77.932.250,00** | **50** | **142.621.885,00** | **50** | **142.621.885,00** | **50** | **48,1** |  |
|  |  | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | Paket | 16 | 76.890.475,00 | 4 | 9.955.000,00 | 4 | 9.700.000,00 | 0 | 0 | 2 | 9.667.000,00 | 2 | 9.667.000,00 | 2 | 9.667.000,00 | 50 | 99,66 |  |
|  |  | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Paket | 12 | 44.000.000 | 3 | 147.487.800,00 | 3 | 13.012.100,00 | 0 | 0 | 1 | 8.385.500,00 | 1 | 8.385.500,00 | 1 | 8.385.500,00 | 33,33 | 64,44 |  |
|  |  | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | Paket | 20 | 146.401.112 | 5 | 25.148.000,00 | 5 | 27.000.000,00 | 1 | 9.164.000,00 | 2 | 5.326.000,00 | 3 | 14.490.000,00 | 3 | 14.490.000,00 | 60 | 53,67 |  |
|  |  | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Paket | 1140 | 362.837.957 | 36 | 45.678.000,00 | 36 | 51.125.000,00 | 7 | 15.275.000,00 | 7 | 8.139.000,00 | 14 | 23.414.000,00 | 14 | 23.414.000,00 | 38,89 | 45,8 |  |
|  |  | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Paket | 4 | 62.679.993 | 1 | 5.930.000,00 | 1 | 5.800.000,00 | 0 | 0 | 0 | 5.799.500,00 | 0 | 5.799.500,00 | 0 | 5.799.500,00 | 0 | 99,99 |  |
|  |  | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan | Dokumen | 96 | 44.124.905 | 24 | 3.480.000,00 | 24 | 4.000.000,00 | 4 | 580.000,00 | 6 | 870.000,00 | 10 | 1.450.000,00 | 10 | 1.450.000,00 | 41,67 | 36,25 |  |
|  |  | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Laporan | 145 | 959.886.389 | 36 | 167.011.322,00 | 36 | 185.878.000,00 | 9 | 39.670.635,00 | 14 | 39.745.250,00 | 23 | 79.415.885,00 | 23 | 79.415.885,00 | 63,89 | 42,72 |  |
| Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 41,11 | 63,22 |  |
| Predikat kinerja(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Rendah |  |
|  |  | **Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart** | **PersenAngka** | **100** | **1.849.218.185,00** | **100** | **557.109.746,00** | **100** | **555.389.000,00** | **0** | **126.844.098,00** | **50** | **158.475.912,00** | **50** | **285.320.010,00** | **50** | **285.320.010,00** | **50** | **51,37** |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Laporan | 144 | 1.849.218.185,00 | 36 | 334.099.287,00 | 36 | 320.000.000,00 | 9 | 90.412.010,00 | 9 | 86.709.736,00 | 18 | 177.121.746,00 | 18 | 177.121.746,00 | 50 | 55,35 |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Laporan | 52 | 982.050.000 | 13 | 223.010.459,00 | 13 | 235.389.000,00 | 2 | 36.432.088,00 | 4 | 71.766.176,00 | 6 | 108.198.264,00 | 6 | 108.198.264,00 | 46,15 | 45,97 |  |
| Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 48,08 | 50,66 |  |
| Predikat kinerja(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Rendah |  |
|  |  | **Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** | **Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart** | **Persen** | **100** | **1.534.024.260,00** | **100** | **259.299.131,00** | **100** | **254.803.940,00** | **0** | **19.021.350,00** | **50** | **34.451.371,00** | **50** | **53.472.721,00** | **50** | **53.472.721,00** | **50** | **20,99** |  |
|  |  | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Unit | 32 | 550.329.431,00 | 8 | 99.888.431,00 | 8 | 97.303.940,00 | 1 | 17.721.350,00 | 2 | 25.196.371,00 | 3 | 42.917.721,00 | 3 | 42.917.721,00 | 37,5 | 44,11 |  |
|  |  | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | Unit | 34 | 154.234.700 | 6 | 92.163.000,00 | 9 | 90.000.000,00 | 1 | 1.300.000,00 | 2 | 9.255.000,00 | 3 | 10.555.000,00 | 3 | 10.555.000,00 | 33,33 | 11,73 |  |
|  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | Unit | 4 | 310.000.000 | 1 | 67.247.700,00 | 1 | 67.500.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pengadaan Peralatan dan Mesin | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lainnya | Lainnya yang Disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Kegiatan dan Laporan pertanggungjawaban kegiatan dilaksanakan tepat waktu.Ketersediaan Anggaran dan Sumber daya manusia (SDM )yang memadai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Faktor penghambat pencapaian kinerja : Mekanisme perencanaan yang kurang baik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksankan evaluasi internal untuk mengatasi faktor penghambat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA berikutnya : Mengoptimalkan Koordinasi dengan pihak terkait** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2 | **SASARAN 2: Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik** |  | **Nilai Hasil Monev PPID** |  | 100 |  | **88,69** |  | 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik** |
|  |  |  | **Presentase Tindak**  **Lanjut Pengaduan**  **Masyarakat** |  | **100** |  |  |  | **100** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK** | **Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan** | **Persen** | **100** | **14.148.571.699,00** | **85** | **2.394.622.618,00** | **90** | **2.540.944.000,00** | **38,5** | **453.128.429,00** | **17,18** | **560.761.971,00** | **55,68** | **1.013.890.400,00** | **55.68** | **1.013.890.400,00** | **61,87** | **39,9** |  |
|  |  |  | **Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah** | **Persen** | **100** |  | **70** |  | **80** |  | **0** |  | **17,18** |  | **17,18** |  | **17.18** | **1.013.890.400,00** | **21,48** |  |  |
|  |  | **Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik** | **Persen** | **89** |  | **45,8** | **2.394.622.618,00** | **57** | **2.540.944.000,00** | **0** | **453.128.429,00** | **9,82** | **560.761.971,00** | **9,82** | **1.013.890.400,00** | **9,82** | **1.013.890.400,00** | **17,23** | **39,9** |  |
|  |  | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Dokumen | 8 | 126.441.159,00 | 1 | 4.717.475,00 | 2 | 27.120.000,00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 100 | 0 |  |
|  |  | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Dokumen | 12 | 73.633.230 | 4 | 16.920.700,00 | 4 | 14.027.400,00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 50 | 0 |  |
|  |  | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Dokumen | 48 | 28.271.619 | 5 | 516.391.141,00 | 12 | 6.370.134,00 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 50 | 0 |  |
|  |  | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Dokumen | 2080 | 786.347.379 | 1.000,00 | 777.677.100,00 | 520 | 188.877.240,00 | 248 | 27.680.736,00 | 263 | 49.945.389,00 | 511 | 77.626.125,00 | 511 | 77.626.125,00 | 98,27 | 41,1 |  |
|  |  | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Dokumen | 34 | 3.603.121.598 | 15 | 182.366.900,00 | 11 | 507.826.440,00 | 3 | 57.122.605,00 | 4 | 144.527.206,00 | 7 | 201.649.811,00 | 7 | 201.649.811,00 | 63,64 | 39,71 |  |
|  |  | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | Dokumen | 28 | 2.722.292.557 | 1 | 5.325.500,00 | 12 | 513.616.760,00 | 3 | 48.147.088,00 | 3 | 134.614.676,00 | 6 | 182.761.764,00 | 6 | 182.761.764,00 | 50 | 35,58 |  |
|  |  | Layanan Hubungan Media | Jumlah Layanan Hubungan Media | Layanan | 5650 | 3.474.761.554 | 30 | 13.962.500,00 | 1100 | 921.930.026,00 | 99 | 320.178.000,00 | 181 | 184.262.100,00 | 280 | 504.440.100,00 | 280 | 504.440.100,00 | 25,45 | 54,72 |  |
|  |  | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Dokumen | 12 | 584.291.587 | 80 | 55.008.800,00 | 1 | 275.361.400,00 | 0 | 0 | 0 | 47.412.600,00 | 0 | 47.412.600,00 | 0 | 47.412.600,00 | 0 | 17,22 |  |
|  |  | Manajemen Komunikasi Krisis | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis | Dokumen | 4 | 52.924.090 | 12 | 8.884.700,00 | 1 | 3.624.500,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya | Orang | 160 | 25.507.816 | 510 | 186.588.440,00 | 30 | 38.761.800,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | Dokumen | 320 | 82.921.332 | 11 | 626.779.362,00 | 80 | 43.428.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 39,76 | 17,12 |  |
| Predikat kinerja(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah |  |
| Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17,23 | 39,9 |  |
| Predikat kinerja(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah |  |
| **Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran dan Sumber daya manusia (SDM )yang memadai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Faktor penghambat pencapaian kinerja : Mekanisme perencanaan yang kurang baik, kurangnya koordinasi dalam mencapai target** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksankan evaluasi internal untuk mengatasi faktor penghambat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA berikutnya : Mengoptimalkan Koordinasi dengan pihak terkait dalam mencapai target per tribulan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3 | Tujuan 1 : Meningkatnya Pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik |  | **Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** |  | **3,45** |  | **3.68** |  | **3.90** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik** |
|  | SASARAN 1: Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK |  | **Persentase layanan publik online dan terintegrasi** |  | **100** |  | **94** |  | **98** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA** | **Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik** | **Persen** | **100** | **41.610.571.857,00** | **90** | **6.326.902.220,00** | **92,89** | **5.699.686.310,00** | **9,89** | **1.575.098.803,00** | **0** | **1.253.432.028,00** | **9,89** | **2.828.530.831,00** | **9.89** | **2.828.530.831,00** | **10,65** | **49,63** |  |
|  |  | **Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **PersenPersen** | **100** | **27.330.598.438,00** | **100** | **5.334.544.570,00** | **100** | **4.965.478.799,00** | **0** | **1.500.753.303,00** | **100** | **1.025.667.448,00** | **100** | **2.526.420.751,00** | **100** | **2.526.420.751,00** | **100** | **50,88** |  |
|  |  | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | Domain | 24 | 87.153.788,00 | 1 | 38.250.000,00 | 6 | 27.806.124,00 | 6 | 27.600.000,00 | 0 | 0 | 6 | 27.600.000,00 | 6 | 27.600.000,00 | 100 | 99,26 |  |
|  |  | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 7 | 279.979.429 | 6 | 5.950.000,00 | 2 | 49.999.880,00 | 2 | 49.990.000,00 | 0 | 0 | 2 | 49.990.000,00 | 2 | 49.990.000,00 | 100 | 99,98 |  |
|  |  | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Unit | 63 | 26.778.275.436 | 3 | 5.290.344.570,00 | 20 | 4.887.672.795,00 | 7 | 1.423.163.303,00 | 10 | 1.025.667.448,00 | 17 | 2.448.830.751,00 | 17 | 2.448.830.751,00 | 85 | 50,1 |  |
| Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 95 | 83,11 |  |
| Predikat kinerja(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi |  |
|  |  | **Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layananan publik** | **Persen** | **100** | **7.066.061.471,00** | **93** | **992.357.650,00** | **96** | **734.207.511,00** | **0** | **74.345.500,00** | **92** | **227.764.580,00** | **92** | **302.110.080,00** | **92** | **302.110.080,00** | **95,83** | **41,15** |  |
|  |  | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Dokumen | 4 | 308.605.384,00 | 1 | 6.547.500,00 | 1 | 47.383.000,00 | 0 | 8.643.000,00 | 0 | 24.859.080,00 | 0 | 33.502.080,00 | 0 | 33.502.080,00 | 0 | 70,7 |  |
|  |  | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Dokumen | 4 | 162.547.827 | 1 | 50.045.000,00 | 1 | 12.060.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola | Unit | 4 | 499.415.000 | 1 | 6.690.000,00 | 1 | 9.198.600,00 | 0 | 0 | 0 | 2.483.000,00 | 0 | 2.483.000,00 | 0 | 2.483.000,00 | 0 | 26,99 |  |
|  |  | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Dokumen | 4 | 3.224.000.000 | 1 | 253.350.000,00 | 1 | 143.680.000,00 | 0 | 44.502.200,00 | 0 | 30.580.000,00 | 0 | 75.082.200,00 | 0 | 75.082.200,00 | 0 | 52,26 |  |
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | Dokumen | 11 | 675.063.600 | 1 | 87.159.600,00 | 3 | 35.300.000,00 | 0 | 0 | 0 | 29.000.082,00 | 0 | 29.000.082,00 | 0 | 29.000.082,00 | 0 | 82,15 |  |
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | perangakat daerah | 8 | 481.202.500 | 1 | 9.150.000,00 | 1.00 | 12.585.000,00 | 0 | 1.560.000,00 | 0 | 10.105.000,00 | 0 | 11.665.000,00 | 0 | 11.665.000,00 | 0 | 92,69 |  |
|  |  | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | Unit | 8 | 2.640.055.280 | 2 | 315.364.000,00 | 2 | 238.298.611,00 | 0 | 2.726.400,00 | 0 | 11.160.000,00 | 0 | 13.886.400,00 | 0 | 13.886.400,00 | 0 | 5,83 |  |
|  |  | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah | Layanan | 7 | 202.000.000 | 1 | 1.590.000,00 | 2 | 8.184.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City | Dokumen | 7 | 99.890.137,50 | 1 | 32.221.642,00 | 2 | 34.891.000,00 | 0 | 0 | 0 | 15.120.000,00 | 0 | 15.120.000,00 | 0 | 15.120.000,00 | 0 | 43,33 |  |
|  |  | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Dokumen | 4 | 1.090.488.872 | 3 | 228.649.908,00 | 1 | 183.724.300,00 | 1 | 16.913.900,00 | 0 | 104.457.418,00 | 1 | 121.371.318,00 | 1 | 121.371.318,00 | 100 | 66,06 |  |
|  |  | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Dokumen | 4 | 7.117.062 | 1 | 1.590.000,00 | 1 | 8.903.000,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 9,09 | 40 |  |
| Predikat kinerja(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah |  |
| Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 97,92 | 46,02 |  |
| Predikat kinerja(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Rendah |  |
| **Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran dan Sumber daya manusia (SDM )yang memadai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Faktor penghambat pencapaian kinerja : Mekanisme perencanaan yang kurang baik kurangnya koordinasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksankan evaluasi internal untuk mengatasi faktor penghambat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA berikutnya : Mengoptimalkan Koordinasi dengan pihak terkait** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | SASARAN 3: Meningkatnya Penyelenggaraan statistik sektoral |  | **Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan** | **100** |  |  | **100,00** |  | **100** |  | **25,00** |  | **25,00** |  |  |  |  |  |  |  | **Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik** |
|  |  |  | **Indeks Pembangunan Statistik** | **3,1** |  |  |  |  | **2,7** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL** | **Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik** | **persen** | **100** | **2.623.032.584,00** | **100** | **328.282.240,00** | **96.71** | **340.838.700,00** | **53,85** | **33.466.900,00** | **0** | **34.822.700,00** | **53,85** | **68.289.600,00** | **53.85** | **68.289.600,00** | **55,68** | **20,04** |  |
|  |  | **Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota** | **Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS** | **Persen** | **100** | **1.850.000.000,00** | **100** | **328.282.240,00** | **100** | **340.838.700,00** | **9,82** | **33.466.900,00** | **15,55** | **34.822.700,00** | **25,37** | **68.289.600,00** | **25,37** | **68.289.600,00** | **25,37** | **20,04** |  |
|  |  | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Dokumen | 14 | 1.850.000.000,00 | 6 | 256.800.737,00 | 3 | 211.845.300,00 | 0 | 6.213.500,00 | 2 | 19.232.000,00 | 2 | 25.445.500,00 | 2 | 25.445.500,00 | 66,67 | 12,01 |  |
|  |  | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Orang | 40 | 84320249 | 30 | 9.950.500,00 | 10 | 27.837.500,00 | 10 | 14.418.000,00 | 11 | 1.162.000,00 | 21 | 15.580.000,00 | 21 | 15.580.000,00 | 210 | 55,97 |  |
|  |  | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | Dokumen | 72 | 113140781 | 12 | 24.750.003,00 | 4 | 26.060.000,00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 |  |
|  |  | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS | Orang | 20 | 14907276 | 8 | 29.200.000,00 | 4 | 55.987.300,00 | 2 | 12.377.900,00 | 0 | 10.776.700,00 | 2 | 23.154.600,00 | 2 | 23.154.600,00 | 50 | 41,36 |  |
|  |  | Pengembangan Infrastruktur | Jumlah Infrastruktur Statistik | Unit | 4 | 113.230.781 | 1 | 3.180.000,00 | 1 | 14.887.300,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun | Dokumen | 4 | 20.196.987 | 28 | 4.401.000,00 | 1 | 4.221.300,00 | 0 | 457.500,00 | 0 | 3.652.000,00 | 0 | 4.109.500,00 | 0 | 4.109.500,00 | 0 | 97,35 |  |
| Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 58,61 | 34,45 |  |
| Predikat kinerja(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah |  |
| Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25,37 | 20,04 |  |
| Predikat kinerja(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Rendah | Sangat Rendah |  |
| **Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Adanya kerjasama yang baik di Lingkungan Diskiminfotik. Ketersediaan Anggaran dan Sumber daya manusia (SDM )yang memadai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Faktor penghambat pencapaian kinerja : Mekanisme perencanaan yang kurang baik** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Mengintensifkan koordinasi baik internal maupun eksternal** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA berikutnya : Lebih mencermati dalam menentukan target kegiatan** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 5 | SASARAN 4: Meningkatnya Keamanan Informasi |  | **Indeks KAMI** |  | **69,77** |  | **46.8** |  | **54.26** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik** |
|  |  | **PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI** | **Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **persen** | **69,77** | **1.979.919.556,00** | **46,8** | **183.184.976,00** | **64,26** | **256.283.000,00** | **0** | **37.801.026,00** | **56** | **185.143.524,00** | **56** | **222.944.550,00** | **56** | **222.944.550,00** | **87,15** | **86,99** |  |
|  |  | **Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota** | **Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintsh daerah kab/kota** | **Persen** | **60,77** | **1.041.888.745,00** | **47,8** | **105.496.350,00** | **54.26** | **165.203.000,00** | **0** | **27.910.000,00** | **70** | **106.643.436,00** | **70** | **134.553.436,00** | **70** | **134.553.436,00** | **129,01** | **81,45** |  |
|  |  | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | Dokumen | 4 | 560.153.853,00 | 8 | 21.646.150,00 | 1 | 75.400.000,00 | 1 | 16.810.000,00 | 0 | 47.434.036,00 | 1 | 64.244.036,00 | 1 | 64.244.036,00 | 100 | 85,2 |  |
|  |  | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Laporan | 18 | 232.811.234 | 6 | 20.784.000,00 | 4 | 49.608.000,00 | 1 | 11.100.000,00 | 1 | 27.915.800,00 | 2 | 39.015.800,00 | 2 | 39.015.800,00 | 50 | 78,65 |  |
|  |  | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Laporan | 9 | 161.937.676 | 3 | 19.687.000,00 | 2 | 24.965.000,00 | 0 | 0 | 1 | 20.380.600,00 | 1 | 20.380.600,00 | 1 | 20.380.600,00 | 50 | 81,64 |  |
|  |  | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | Perangkat Daerah | 82 | 86.985.982 | 35 | 43.379.200,00 | 20.00 | 15.230.000,00 | 0 | 0 | 12 | 10.913.000,00 | 12 | 10.913.000,00 | 12 | 10.913.000,00 | 60 | 71,65 |  |
| Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 65 | 79,29 |  |
| Predikat kinerja(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Rendah | Tinggi |  |
|  |  | **Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota** | **Persentase penerapan pola hubungan komunikasi sandi** | **persen** | **100** | **579.715.441,00** | **35,2** | **77.688.626,00** | **50** | **91.080.000,00** | **0** | **9.891.026,00** | **86** | **78.500.088,00** | **86** | **88.391.114,00** | **86** | **88.391.114,00** | **172** | **97,05** |  |
|  |  | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | Perangkat Daerah | 140 | 572.301.082,00 | 35 | 77.688.626,00 | 40.00 | 91.080.000,00 | 8 | 9.891.026,00 | 44 | 78.500.088,00 | 52 | 88.391.114,00 | 52 | 88.391.114,00 | 130 | 97,05 |  |
| Rata-rata capaian kinerja Per SubKegiatan(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 130 | 97,05 |  |
| Predikat kinerja(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Sangat Tinggi |  |
| Rata-rata capaian kinerja Per Kegiatan(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 150,51 | 89,25 |  |
| Predikat kinerja(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Sangat Tinggi | Tinggi |  |
| **Faktor pendorong keberhasilan kinerja : Ketersediaan Anggaran dan Sumber daya manusia (SDM )yang memadai** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Faktor penghambat pencapaian kinerja : Merkanisme kerja yang kurang koordinasi** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Tindak lanjut yang diperlukan dalam triwulan berikutnya : Melaksankan evaluasi internal untuk mengatasi faktor penghambat** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| **Tindak lanjut yang diperlukan dalam RENJA berikutnya : Mengoptimalkan Koordinasi dengan pihak terkait** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| Rata-rata capaian kinerja Per Program(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | 56,91 | 41,89 |  |  |  |
| Predikat kinerja(%) | | | | | | | | | | | | | | | | | Rendah | Sangat Rendah |  |  |  |
| **Total** | | | | | | | | | | | | | | | | | **14.075.965.046,00** | | | **7.003.218.098,00** |  |
| **Persentase Realisasi Anggaran** | | | | | | | | | | | | | | | | | **49.75%** | | | |  |
| **Predikat** | | | | | | | | | | | | | | | | | **Sangat Rendah** | | | |  |

BAB III

34

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

Perubahan Rencana Kerja Dinas komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024 ini akan dimuat tentang Tujuan, Sasaran, kegiatan lanjutan, kegiatan yang dihapus, penambahan kegiatan baru, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Tabel 3.1 Perubahan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah Tahun 2024

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| No | Tujuan/Sasaran | Indikator Tujuan/Sasaran | Definisi Operasional | Target Tahun 2024 | |
| Sebelum | Sesudah |
| 1 | Meningkatnya pengembangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik | Indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik | Penilaian SPBE dilakukan oleh KemenpanRB dan di dalamnya terdapat 4 domain yang terdiri dari domain kebijakan, tata kelola, manajemen, dan layanan SPBE. Setiap domain memiliki bobot dan nilai tingkat kematangan masing-masing dalam penilaian SPBE | 3,20 | 3,9 |
| 1 | Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK | Persentase layanan publik online dan terintegritasi | Layanan Publik Online Terintegrasi : Layanan untuk masyarakat yang disediakan dalam bentuk aplikasi atau sistem informasi dan terhubung dengan sistem yang lain | 98% | 98% |
| 2 | Meningkatnya sistem keterbukaan informasi publik | Nilai Hasil Monev PPID | Hasil Monev Keterbukaan Informasi Publik adalah penilaian yang dilakukan untuk mengetahui sejauh mana implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik | 91 | 91 |
| 4 | Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan | Perencanaa OPD : Dokumen Renja  Evaluasi Pembangunan : Dokumen LKJIP | 98% | 100% |
| 5 | Meningkatnya Keamanan Informasi | Indeks KAMI | Nilai Per Area Keamanan Informasi : 7 Area Keamanan  1. Tata kelola  2.Pengelolaan Resiko  3.Kerangja Kerja  4.Pengelolaan Aset  5.Teknologi  6.Suplemen  7.Katagori SE | 54,26% | 54,26% |
| 2 | Meningkatnya Tata Kelola Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah Kota Blitar | A  86,25 | A  86,25 |
| 1 | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Penilaian SAKIP dari Inspektorat Daerah Kota Blitar | A  86,25 | A  86,25 |

*Sumber : Diskominfotik Kota Blitar, 2024*

Tabel. 3.2 Rencana Tindak Lanjut LKJIP Tahun 2023 pada Perubahan Renja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024

| **No** | **Langkah Perbaikan LKj IP** | **Rencana Tindak Lanjut** | **Pemetaan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan** |
| --- | --- | --- | --- |
|
| 1 | Meningkatnya layanan SPBE melalui kebijakan dan tata kelola TIK | * Mensosialisasikan arsitektur proses bisnis dan layanan sistem elektronik sesuai indikator yanga ada di SPBE. * Menyusun standar manajemen layanan mulai dari pelayanan pengguna hingga pengoperasian layanan tersebut. Sosialisasi standar teknis pengembangan aplikasi | * Program Aplikasi Informatika * Kegiatan Pengelolaan E-gov di lingkup Pemda Kab/Kota * Sub Kegiatan Penatalaksanaan dan Pengawaasan E-Gov dalam penyelenggaraan Pemda Kab/Kota |
| 2 | Meningkatnya Sistem Keterbukaan Informasi Publik | * Optimalisasi dukungan perangkat derah dalam memberikan data pelaksanaan pengadaan barang dan jasa. * Mengadakan rapat koordinasi dan monev atas hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Komisi Informasi. * Himbauan kepada perangkat daerah untuk mengalokasikan anggaran keterbukaan informasi publik | * Program Informasi Komunikasi Publik * Kegiatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota * Sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik |
| 3 | Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah | * Pendampingan Pengolahan Data Statistik Sektoral pada Perencanaan pembangunan dan Evaluasi pembangunan pada perangkat daerah. * Memberikan rekomendasi dan analisis pada perangkat daerah yang menangani perencanaan dan evaluasi. | * Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral * Kegiatan Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota * Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral |
| 4 | Meningkatnya Keamanan Informasi. | * Pendampingan dan Asistensi Indeks KAMI dan Manajemen Risiko SPBE perangkat daerah yang menjadi objek penilaian yang memperoleh nilai rendah. * Memberikan rekomendasi pada perangkat daerah yang menjadi sasaran penilaian Indeks KAMI | * Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi * Kegiatan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota * Sub Kegiatan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik |
| 5 | Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah | * Memanfaatkan teknologi informasi dalam pengumpulan data kinerja * Memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi pengukuran kinerja untuk penyesuaian (refocusing) organisasi, penyesuaian kebijakan, strategi, dan penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja * Memanfaatkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja, mendukung efektivitas dan efisiensi kinerja, perbaikan dan peningkatan | * Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota * Kegiatan Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah * Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |

**Tabel 3.3 Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 yang mengalami Perubahan**

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Perubahan Target dan Pagu Indikatif | | | | Keterangan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target 2024 | | Pagu Indikatif (Rp) | |
| Semula | Menjadi | RENJA 2024 | RENJA Perubahan 2024 |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan | 7 Laporan | 10.000.000,00 | 9.880.000,00 | Kegiatan Monev SKM dan RENJA |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 31 Orang/bulan | 31 Orang/bulan | 3.987.165.046,00 | 4.177.165.046,00 | Penambahan kekurangan gaji ASN |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan | 65 Paket | 65 Paket | 24.790.400,00 | 31.290.400,00 | Penambahan Batik/Djadul TPL |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | 68 Orang | 100 Orang | 92.110.400,00 | 76.176.800,00 | Dialokasikan untuk Penyediaan bahan logistik kantor |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan | 5 Paket | 5 Paket | 27.000.000,00 | 22.452.220,00 | Digeser untuk memeliharaan kendaraan dinas |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 36 Paket | 36 Paket | 51.125.000,00 | 58.525.000,00 | Pergeseran dari kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 36 Laporan | 36 Laporan | 320.000.000,00 | 382.849.380,00 | Pergeseran dari sisa Pagu Gaji ASN |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 8 Unit | 8 Unit | 97.303.940,00 | 102.767.940,00 | Pergeseran dari Peralatan Rumah Tangga |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | 9 Unit | 9 Unit | 90.000.000,00 | 88.024.000,00 | Digeser untuk memeliharaan kendaraan dinas |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 1 Unit | 1 Unit | 67.500.000,00 | 68.000.000,00 | menyesuaikan kebutuhan pemelihaaan gedung. |
|  | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 27.120.000,00 | 2.120.000,00 | Sudah terealisasi target Sub kegiatan berupa 2 dokumen Perwali dan SK SP4N  Lapor dialihkan untuk Movev 112 dan Rakor PPID pada sub Kegiatan Pelayanan Informasi Publik |
|  | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | 520 Dokumen | 520 Dokumen | 188.877.240,00 | 197.777.240,00 | Bantuan Transport Masyarakat Acara bimtek dengan pegiat Medsos / Influencer (pergeseran dari Sub Keg. Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan) |
|  | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 507.826.440,00 | 493.626.440,00 | dialihkan untuk acara Bimtek pegiat Medsos / Influencer seKota Blitar pada Sub Keg. Pengelolaan Konten dandialihkan untuk acara Monev SP4N Lapor (pada sub Keg. Pelayanan Informasi Publik) |
|  | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0006 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 513.616.760,00 | 549.626.760,00 | Mamin Movev 112 dan Rakor PPID (pergeseran dari Sub Keg. Perumusan kebijakan teknis), untuk acara Monev SP4N Lapor (pergeseran dari sub Keg. Pengelolaan Media Komunikasi Publik),untuk acra Rakor PPID (pergeseran dari Sub Keg. Penyenelngaraan Hubungan Masyarakat) Monev Visitasi PPID beserta Honor Narasumber dan Sewa Peralatan Umum |
|  | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0008 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 275.361.400,00 | 273.361.400,00 |  |
|  | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0012 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan | 80 Dokumen | 80 Dokumen | 43.428.300,00 | 39.718.300,00 |  |
|  |  | 2 | 16 | 03 | 2.02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 42.522.400,00 | 42.983.000,00 | Digeser untuk kekurangan gaji THL |
|  | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0002 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 37.269.100,00 | 3.180.000,00 | Master plan SPBE  Digeser untuk kekurangan gaji THL |
|  | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan | 2 Unit | 2 Unit | 198.250.500,00 | 323.928.611,00 | Pengembangan aplikasi ASAKIP, sosialisasi aplikasi SAKIP, sosialisasi SI arsitektur SPBE |
|  | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0010 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 178.967.311,00 | 197.004.300,00 | Penambahan gaji THL |
|  | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 211.845.300,00 | 186.845.300,00 | Jasa Konsultasi ekonomi Makro, IMP indeks Gini dialihkan ke Kegiatan Satu Data Kota Blitar Award |
|  | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0003 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 26.060.000,00 | 18.627.500,00 | Jasa Konsul dialihkan untuk Desk Menyusun Meta Data |
|  | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0004 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS | 4 Orang | 4 Orang | 55.987.300,00 | 88.419.800,00 | Penambahan Kegiatan Satu Data Kota Blitar Award |
|  | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 75.400.000,00 | 67.658.200,00 | Penggeseran diguna peningkatan kegiatan Bimtek Keamanan Informasi, Siber dan Persandian |
|  | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | 4 Laporan | 4 Laporan | 49.608.000,00 | 64.074.000,00 | Dipergunakan peningkatan kegiatan Bimtek Keamanan Informasi, Siber dan Sandi |
|  | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi | 20 Perangkat Daerah | 20 Perangkat Daerah | 15.230.000,00 | 10.985.000,00 | Penggeseran diguna peningkatan kegiatan Bimtek Keamanan Informasi, Siber dan Persandian |
|  | 2 | 21 | 02 | 2.02 | 0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi | 40 Perangkat Daerah | 30 Perangkat Daerah | 91.080.000,00 | 88.474.800,00 | Penggeseran diguna peningkatan kegiatan Bimtek Keamanan Informasi, Siber dan Persandian |

**Tabel 3.4 Perubahan Rumusan Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2024 dan Prakiraan Maju Tahun 2025**

| No | Kode | | | | | Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan | Target Akhir Periode RPJM | Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | Kelompok Sasaran | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2025 | | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Target 2024 | | Pagu Indikatif (Rp) | | | Lokasi | Sumber Dana | Prioritas | | Target | Pagu Indikatif (Rp) |
| Sebelum | Sesudah | RENJA 2024 | APBD 2024 | RENJA Perubahan 2024 | Nasional | Daerah |
| 1 | 2 | | | | | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|  |  |  |  |  |  | Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik | | | | | 13.771.595.046,00 | 14.076.595.046,00 | 14.411.595.046,00 |  |  |  |  |  |  | 14.722.978.294,00 |  |
|  | 2 |  |  |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |  |  | 13.771.595.046,00 | 14.076.595.046,00 | 14.411.595.046,00 |  |  |  |  |  |  | 14.722.978.294,00 |  |
|  | 2 | 16 |  |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |  |  |  |  | 13.174.473.346,00 | 13.479.473.346,00 | 13.814.609.346,00 |  |  |  |  |  |  | 14.104.625.664,00 |  |
| 1 | 2 | 16 | 01 |  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) | 84 INDEKS | 84 INDEKS | 84 INDEKS | 5.238.213.036,00 | 5.238.213.036,00 | 5.488.349.036,00 |  |  |  |  |  | Baik (79-84) | 5.660.473.640,00 |  |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.01 |  | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan dan pelaporan yang tepat waktu dan sesuai standart | 100 | 100 | 100 | 20.139.150,00 | 20.139.150,00 | 20.019.150 |  |  | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | ASN /PTT | 100 | 22.461.500,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 5.239.150,00 | 5.239.150,00 | 5.239.150,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 11 | 7.316.500,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 7 Laporan | 7 Laporan | 7 Laporan | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 9.880.000,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 7 | 10.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 1 Laporan | 1 Laporan | 1 Laporan | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 1 | 5.145.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.02 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi keuangan perangkat daerah sesuai standar | 100 Persen | 100 Persen | 100 Persen 85 angka | 3.994.465.046,00 | 3.994.465.046,00 | 4.184.465.046,00 |  |  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | ASN /PTT | 100 | 4.294.188.300,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |  | 31 Orang/bulan | 31 Orang/bulan | 3.987.165.046,00 | 3.987.165.046,00 | 4.177.165.046,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 13 | 4.286.523.300,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.02 | 0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD |  | 4 Laporan | 4 Laporan | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | 7.300.000,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 4 | 7.665.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.05 |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah yang sesuai standar | - | 100 Persen | 85 angka | 116.900.800,00 | 116.900.800,00 | 107.467.200,00 |  |  | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | ASN /PTT | 100 | 115.746.340,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.05 | 0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan |  | 65 Paket | 65 Paket | 24.790.400,00 | 24.790.400,00 | 31.290.400,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 65 | 35.537.400,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.05 | 0010 | Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan | Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan |  | 68 Orang | 100 Orang | 92.110.400,00 | 92.110.400,00 | 76.176.800,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 100 | 80.208.940,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.06 |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase ketersediaan administrasi umum perangkat daerah sesuai standar | - | 100 Persen | 100 Persen 85 angka | 296.515.100,00 | 296.515.100,00 | 299.367.320,00 |  |  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | ASN /PTT | 100 | 319.250.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan |  | 4 Paket | 4 Paket | 9.700.000,00 | 9.700.000,00 | 9.700.000,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 4 | 10.185.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  | 3 Paket | 3 Paket | 13.012.100,00 | 13.012.100,00 | 13.012.100,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 3 | 13.700.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan |  | 5 Paket | 5 Paket | 27.000.000,00 | 27.000.000,00 | 22.452.220,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 5 | 24.350.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |  | 36 Paket | 36 Paket | 51.125.000,00 | 51.125.000,00 | 58.525.000,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 36 | 62.725.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |  | 1 Paket | 1 Paket | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | 5.800.000,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 1 | 6.090.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan |  | 24 Dokumen | 24 Dokumen | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 24 | 4.200.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | 36 Laporan | 36 Laporan | 185.878.000,00 | 185.878.000,00 | 185.878.000,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 36 | 198.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.08 |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase penyediaan jasa penunjang urusan sesuai standart | - | 100 PersenAngka | 100 PersenAngka 85 angka | 555.389.000,00 | 555.389.000,00 | 618.238.380,00 |  |  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | ASN/PTT/THL | 100 | 638.652.500,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  | 36 Laporan | 36 Laporan | 320.000.000,00 | 320.000.000,00 | 382.849.380,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 36 | 395.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |  | 13 Laporan | 13 Laporan | 235.389.000,00 | 235.389.000,00 | 235.389.000,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 13 | 243.652.500,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.09 |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah Persentase BMD yang terpelihara sesuai standart | - | 100 Persen | 100 Persen 85 angka | 254.803.940,00 | 254.803.940,00 | 258.791.940 |  |  | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | ASN /PTT | 100 | 270.175.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |  | 8 Unit | 8 Unit | 97.303.940,00 | 97.303.940,00 | 102.767.940,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 8 | 106.800.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara |  | 9 Unit | 9 Unit | 90.000.000,00 | 90.000.000,00 | 88.024.000,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 8 | 92.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi |  | 1 Unit | 1 Unit | 67.500.000,00 | 67.500.000,00 | 68.000.000,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | - | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 1 | 70.875.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 2 | 2 | 16 | 02 |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK | Persentase komunitas masyarakat/mitra strategis pemerintah daerah yang menyebarkan informasi dan kebijakan pemerintah daerah  Persentase diseminasi dan layanan informasi publik yang dilaksanakan sesuai dengan strategi komunikasi (STARKOM) dan SOP yang Ditetapkan |  | 80 90 Persen Persen | 80 90 Persen Persen | 2.235.944.000,00 | 2.540.944.000,00 | 2.540.944.000,00 |  |  |  |  |  | 95 90 | 2.319.123.413,00 |  |
|  | 2 | 16 | 02 | 2.01 |  | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik | - | 57 Persen | 57 Persen | 2.235.944.000,00 | 2.540.944.000,00 | 2.540.944.000,00 |  |  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | Masyarakat | 68,5 | 2.319.123.413,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0001 | Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Perumusan Kebijakan Teknis Bidang Informasi dan Komunikasi Publik |  | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 27.120.000,00 | 27.120.000,00 | 2.120.000,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 2 | 2.847.600,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0002 | Monitoring Opini dan Aspirasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik |  | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 14.027.400,00 | 14.027.400,00 | 14.027.400,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 4 | 14.550.270,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0003 | Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah |  | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 6.370.134,00 | 6.370.134,00 | 6.370.134,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 12 | 6.688.641,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0004 | Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik |  | 520 Dokumen | 520 Dokumen | 188.877.240,00 | 188.877.240,00 | 197.777.240,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 520 | 209.750.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik |  | 11 Dokumen | 11 Dokumen | 507.826.440,00 | 507.826.440,00 | 493.626.440,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 11 | 497.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0006 | Pelayanan Informasi Publik | Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik |  | 12 Dokumen | 12 Dokumen | 513.616.760,00 | 513.616.760,00 | 549.626.760,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 12 | 555.828.818,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0007 | Layanan Hubungan Media | Jumlah Layanan Hubungan Media |  | 1100 Layanan | 1100 Layanan | 616.930.026,00 | 921.930.026,00 | 921.930.026,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 1150 | 656.935.774,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0008 | Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan |  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 275.361.400,00 | 275.361.400,00 | 273.361.400,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 1 | 290.070.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0009 | Manajemen Komunikasi Krisis | Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Manajemen Komunikasi Krisis |  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 3.624.500,00 | 3.624.500,00 | 3.624.500,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 1 | 3.805.725,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  |  | 2 | 16 | 02 | 2.01 | Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik | Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkat Kapasitasnya |  | 30 Orang | 30 Orang | 38.761.800,00 | 38.761.800,00 | 38.761.800,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 30 | 40.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 02 | 2.01 | 0012 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas | Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan |  | 80 Dokumen | 80 Dokumen | 43.428.300,00 | 43.428.300,00 | 39.718.300,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 80 | 41.646.585,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
| 3 | 2 | 16 | 03 |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA | Persentase penerapan sistem elektronik dalam layanan publik |  | 92,89 Persen | 92,89 persen | 5.700.316.310,00 | 5.700.316.310,00 | 5.785.316.310,00 |  |  |  |  |  | 95 | 6.125.028.611,00 |  |
|  | 2 | 16 | 03 | 2.01 |  | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase layanan publik online dan terintegritasi | - | 100 PersenPersen | 98 persen | 4.909.160.910,00 | 4.965.478.799,00 | 4.965.478.799,00 |  |  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | PERANGKAT DAERAH | 100 | 5.181.750.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 03 | 2.01 | 0001 | Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota | Jumlah Pendaftaran Nama Domain Pemerintah Kabupaten/Kota |  | 6 Domain | 6 Domain | 4.999.995,00 | 27.806.124,00 | 27.806.124,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 6 | 5.250.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 03 | 2.01 | 0002 | Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |  | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 29.999.880,00 | 49.999.880,00 | 49.999.880,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 2 | 31.500.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 03 | 2.01 | 0003 | Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah |  | 20 Unit | 20 Unit | 4.874.161.035,00 | 4.887.672.795,00 | 4.887.672.795,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 20 | 5.145.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 03 | 2.02 |  | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase layanan publik online dan terintegritasi Presentase ketersediaan aplikasi pemerintahan dan layananan publik | - | 96 Persen | 96 Persen | 791.155.400,00 | 734.837.511,00 | 734.837.511,00 |  |  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | PERANGKAT DAERAH | 98 | 943.278.611,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  |  | 2 | 16 | 03 | 2.02 | Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota |  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 42.522.400,00 | 47.383.000,00 | 42.983.000,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 1 | 45.300.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0002 | Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik |  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 37.269.100,00 | 12.060.000,00 | 3.180.000,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 1 | 3.300.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0003 | Pengelolaan Pusat Data Pemerintahan Daerah | Jumlah Pusat Data Pemerintahan Daerah yang Dikelola |  | 1 Unit | 1 Unit | 9.338.000,00 | 9.198.600,00 | 9.198.600,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 1 | 11.875.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0004 | Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Sistem Komunikasi Intra Pemerintah Daerah |  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 199.997.889,00 | 143.680.000,00 | 143.680.000,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 1 | 210.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi | Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Sistem Keamanan Informasi |  | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 39.253.400,00 | 35.300.000,00 | 35.300.000,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 3 | 42.750.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0006 | Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik | Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan Koordinasi dan Sinkronisasi Data dan Informasi Elektronik |  | 1 Perangkat Daerah | 1 Perangkat Daerah | 12.724.400,00 | 12.585.000,00 | 12.585.000,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 1 | 14.450.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0007 | Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik | Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan |  | 2 Unit | 2 Unit | 198.250.500,00 | 238.928.611,00 | 323.928.611,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 2 | 333.928.611,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0008 | Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah | Jumlah Layanan Publik yang Terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah |  | 2 Layanan | 2 Layanan | 33.323.400,00 | 8.184.000,00 | 8.184.000,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 2 | 36.575.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0009 | Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas | Jumlah Dokumen Program Inovasi yang Diimplementasikan Sesuai dengan Masterplan Smart City |  | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 34.931.000,00 | 34.891.000,00 | 34.891.000,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 2 | 38.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0010 | Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah | Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah |  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 178.967.311,00 | 183.724.300,00 | 197.004.300,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 1 | 202.000.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 16 | 03 | 2.02 | 0011 | Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) | Jumlah Dokumen Pengelolaan Government Chief Information Officer (GCIO) |  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.578.000,00 | 8.903.000,00 | 8.903.000,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 1 | 5.100.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 20 |  |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK | | | | | 340.838.700,00 | 340.838.700,00 | 340.838.700,00 |  | | | | |  | 353.433.340,00 |  |
| 4 | 2 | 20 | 02 |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL | Persentase Data statistik yang terpublikasi menggunakan sistem elektronik |  | 96.71 persen | 96.71 persen | 340.838.700,00 | 340.838.700,00 | 340.838.700,00 |  |  |  |  |  | 98,31 | 353.433.340,00 |  |
|  | 2 | 20 | 02 | 2.01 |  | Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota | Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan dan evaluasi pembangunan Presentase survey statistik sektoral yang mendapat rekomendasi dari BPS | - | 100 Persen | 100 Persen | 340.838.700,00 | 340.838.700,00 | 340.838.700,00 |  |  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | PERANGKAT DAERAH | 100 | 353.433.340,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral | Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral |  | 3 Dokumen | 3 Dokumen | 211.845.300,00 | 211.845.300,00 | 186.845.300,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 3 | 191.713.960,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0002 | Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi | Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi |  | 10 Orang | 10 Orang | 27.837.500,00 | 27.837.500,00 | 27.837.500,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 10 | 30.266.850,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0003 | Membangun Metadata Statistik Sektoral | Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun |  | 4 Dokumen | 4 Dokumen | 26.060.000,00 | 26.060.000,00 | 18.627.500,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 4 | 20.628.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0004 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral | Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Pelatihan Statistik Sektoral dari BPS |  | 4 Orang | 4 Orang | 55.987.300,00 | 55.987.300,00 | 88.419.800,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 4 | 90.760.500,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0005 | Pengembangan Infrastruktur | Jumlah Infrastruktur Statistik |  | 1 Unit | 1 Unit | 14.887.300,00 | 14.887.300,00 | 14.887.300,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 1 | 15.631.665,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 20 | 02 | 2.01 | 0006 | Penyelenggaraan Otorisasi Statistik Sektoral di Daerah | Jumlah Data Statistik Sektoral yang Dihimpun |  | 1 Dokumen | 1 Dokumen | 4.221.300,00 | 4.221.300,00 | 4.221.300,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 1 | 4.432.365,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 21 |  |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN | | | | | 256.283.000,00 | 256.283.000,00 | 256.147.000,00 |  | | | | |  | 264.919.290,00 |  |
| 5 | 2 | 21 | 02 |  |  | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI | Persentase implementasi Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  | 64,26 persen | 64,26 persen | 256.283.000,00 | 256.283.000,00 | 256.147.000,00 |  |  |  |  |  | 62,02 | 264.919.290,00 |  |
|  | 2 | 21 | 02 | 2.01 |  | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Indeks KAMI Kepatuhan OPD terhadap penerapan persandian untuk pengamanan informasi pemerintsh daerah kab/kota | - | 54.26 Persen | 54,26 indeks | 165.203.000,00 | 165.203.000,00 | 165.203.000,00 |  |  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | PERANGKAT DAERAH | 62,02 | 174.559.290,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0001 | Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan |  | 1 Dokumen | 2 Dokumen | 75.400.000,00 | 75.400.000,00 | 67.658.200,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 1 | 68.781.290,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |  | 4 Laporan | 4 Laporan | 49.608.000,00 | 49.608.000,00 | 64.074.000,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 4 | 66.600.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik | Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik |  | 2 Laporan | 2 Laporan | 24.965.000,00 | 24.965.000,00 | 24.955.000,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 2 | 27.187.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 21 | 02 | 2.01 | 0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi |  | 20 Perangkat Daerah | 20 Perangkat Daerah | 15.230.000,00 | 15.230.000,00 | 10.985.000,00 | Kota Blitar, Kepanjenkidul, Sentul | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 21 | 11.991.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 21 | 02 | 2.02 |  | Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota | Indeks KAMI | - | 50 persen | 54,26 indeks | 91.080.000,00 | 91.080.000,00 | 88.474.800,00 |  |  | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi | PERANGKAT DAERAH | 75 | 90.360.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | 2 | 21 | 02 | 2.02 | 0001 | Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi |  | 40 Perangkat Daerah | 30 Perangkat Daerah | 91.080.000,00 | 91.080.000,00 | 88.474.800,00 | Kota Blitar, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Blitar, Kepanjenkidul, Bendo | Pendapatan Bagi Hasil | Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik | Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi Informasi |  | 40 | 90.360.000,00 | DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK |
|  | **J U M L A H** | | | | | | | | | | **13.771.595.046,00** | **14.076.595.046,00** | **14.411.595.046,00** |  |  |  |  |  |  | **14.722.978.294,00** |  |

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024 disusun dalam kerangka menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan. penganggaran. pelaksanaan. dan pengawasan baik terkait penyesuaian dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Blitar Tahun 2021-2026 maupun yang terkait dengan perencanaan. penganggaran. serta pelaksanaan pembangunan yang menjadi target kinerja Pemerintah Kota Blitar.

a. Kaidah Pelaksanaan

Perubahan Rencana Kerja Diskominfotik Kota Blitar Tahun 2024. merupakan penyesuaian dokumen perencanaan yang sifatnya lebih operasional dan mempunyai yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Perubahan sebagai implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah daerah dan Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Dalam kerangka pemikiran tersebut. maka perlu dirumuskan kaidah – kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Perubahan RENJA) Diskominfotik Kota Blitar Tahun 2024 mengacu pada Perubahan RENJA Kota Blitar Tahun 2024.
2. Sekretariat. Bidang-bidang dan seluruh staf Diskominfotik secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk:
   * melaksanakan Perubahan Renja Tahun 2024 dengan sebaik-baiknya sesuai tugas dan kewenangannya;
   * menjaga konsistensi antara RENJA. Renja dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 akan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi Kinerja secara berkala.

b. Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Perubahan RENJA Tahun 2024 menjadi landasan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 serta Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. yang selanjutnya akan digunakan dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024. Perubahan Renja tahun 2024 selanjutnya digunakan sebagai dasar dalam penyusunan dokumen perubahan rencana kerja dan anggaran (P-RKA) Tahun 2024

Peningkatan kapasitas SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan urusan pemerintah di bidang komunikasi. informatika. bidang statistic dan bidang persandian yang menjadi kewenangan daerah. Upaya peningkatan dapat dilakukan melalui pendidikan formal. bimtek. pelatihan. seminar serta kegiatan lainnya yang menunjang peningkatan kinerja SDM.

Semoga Perubahan Rencana Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Blitar Tahun 2024 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh guna mencapai target yang telah ditetapkan.

|  |  |
| --- | --- |
|  | Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar  {QR}  **MUJIANTO, S.Sos, M.Si.**  Pembina Utama Muda  NIP. 19720214 199201 1 003 |